

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN**

Pada Bab III penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti berkenaan dengan Manajemen Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang sudah ditentukan kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga dapat diketahui Manajemen Pengelolaan Ruang terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang berkaitan langsung dengan kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Wawancara dilakukan secara terstruktur yakni dengan menggunakan daftar pertanyaan atau *interview guide* yang berisi tentang fenomena Manajemen Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang akan ditanyakan oleh peneliti. Pertanyaan yang diajukan disusun secara urut untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara. Informan di dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yang berkaitan langsung dengan Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, meliputi Kepala Bagian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dan Staf Bagian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Identitas Informan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang**

NO	NAMA	JABATAN
1.	ZAIS SUYONO, ST	Kepala Bagian Pertamanan dan Pemakaman
2.	DIDIK BUDIONO, SH, MSi	Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman
3.	DIANA LILAWATI, SE, MSi	Kepala Seksi Penyelenggara Pertamanan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

### **3.1 MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG**

Secara umum kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang jika menurut kriteria Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 adalah sebesar 52,31% dari luas wilayahnya, sedangkan jika menurut kriteria Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 luas Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang hanya seluas 7,5% dari luas wilayahnya. Secara kualitas fungsi, peranan dan manfaat Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang masih belum tercapai menurut amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

RTH. Hal ini dipertegas oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Kita akui saja jujur Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang belum bisa mencapai seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mas, tapi ada peningkatan. Informasi dari Bappeda Tahun 2014 sampe sekarang RTH kita meningkat 0,30%. Sekarang total persentase RTH kita 7,5%. Ya mudah-mudahan setiap tahun kita naik bisa mencapai potensinya yang ideal 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan kita akan tetap berusaha mas.” (wawancara 24 Februari 2017 )

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Untuk Ruang Terbuka Hijau persentasenya ya belum mencapai 30% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tidak semudah itu mas, era sekarang masyarakat sekarang apalagi masyarakat kota Semarang itu sulit diatur. Seharusnya masyarakat itu bisa menyadari seperti yang terjadi di beberapa daerah, contoh: Bandung itu masyarakatnya sudah sadar akan Ruang Terbuka Hijau. Membangun taman dimana-mana itu bukan hanya pemerintah saja tetapi masyarakatnya ikut berpartisipasi, tapi yang terjadi di kota Semarang? kita bisa lihat demo minta taman. Itulah seharusnya sebuah kebijakan pemerintah itu untuk sekarang ini atau untuk tahun yang akan datang itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk saat ini baru bisa dilaksanakan Ruang Terbuka Hijau 7,5% mas.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang saat ini kondisinya sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh beberapa pakar landscape. Perencanaan untuk tahun 2017 ini sudah dipersiapkan dengan perencanaan yang sangat fenomenal, dimana membangun 25 taman baru yang meliputi 16 kecamatan mas. Kita tidak berani

membangun sebuah kawasan apakah itu taman, apakah itu untuk perumahan dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan mas, apalagi kita sudah punya Perda RTH. Saat ini Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang baru mencapai 7,5% mas, belum sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Harapan kedepannya dengan pembangunan 25 taman yang baru tadi mas RTH di kota Semarang ini tiap tahunnya makin meningkat.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam kaitannya dengan kesiapan di dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah siap untuk melakukannya antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerja sama dengan komponen masyarakat, pembangunan taman baru, melakukan rehabilitasi terhadap taman, pengembangan sumber daya manusia, dan melakukan pengalihan kawasan industri. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Kesiapannya untuk meningkatkan RTH setiap tahun kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam arti potensi apa yang di lingkungan situ bisa dibangun kawasan RTH, baik taman maupun hutan kota. Taman itu tidak monoton taman, ada satu permainan buat anak. Memang kemarin ada usulan membangun khusus taman yang ramah anak ,kita memang belum mengarah kesana tapi kita mencoba kedepannya membangun taman yang ramah anak.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Tahun 2015 sampai 2017 ini kita sudah tepat membangun semua kawasan RTH sesuai dengan Undang-Undang maupun Perda, kalau tidak memenuhi itu kita tidak berani. Perlu kita ketahui para pakar mau ikut mendukung perencanaan pembangunan, mereka akan mencurahkan semua kemampuannya untuk pelaksanaan

pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Kita ketahui RTH tidak semudah itu, tidak hanya pemerintah kota tapi seluruh komponen masyarakat untuk bisa membantu pembangunan apakah itu tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan maupun pemerintah kota. Sekarang ini juga kita sudah berusaha mengalihkan beberapa perusahaan industri untuk dialihkan ke zona-zona industri, seperti di kawasan Jaya Kusuma, kawasan Genuk dan beberapa kawasan yang sesuai dengan kebutuhan RTH juga.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sendiri caranya dengan melakukan pembangunan 25 taman baru yang meliputi 16 kecamatan, disamping pembangunan taman baru kita juga tidak akan melupakan taman-taman yang sebelumnya sudah dibangun. Kita akan melakukan rehabilitasi fungsi terhadap taman-taman yang sudah ada. Rehabilitasi fungsi yang dimaksud disini yaitu penambahan pohon peneduh, perawatan taman, penambahan dekorasi taman dan penambahan fasilitas sosial pada setiap taman.” (wawancara 27 Februari 2017)

### **3.2 PERENCANAAN**

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki.

#### **1. Menentukan tujuan, sasaran atau visi misi**

Perencanaan yang baik diawali dengan visi dan misi yang jelas, visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ialah Terwujudnya

Penataan Ruang Kota Semarang yang Terpadu, Terkendali dan Menuju Kota Metropolitan yang Bersih dan nyaman.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Tentunya visi misi nya sesuai dengan visi misi pemerintah kota Semarang yaitu mensejahterakan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau yang memadai, ya intinya itu mas.” (wawancara 24 Februari 2017)

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Tujuan utama yaitu agar kota Semarang ini menjadi bersih, bebas dari polusi, karena sebuah kawasan perkotaan apalagi kita menuju kota metropolitan kalau tidak diikuti dengan kebutuhan hijau bersih efek dan dampaknya ke anak cucu kita nantinya. Kita umpamanya sudah berusaha membangun apakah itu kebutuhan primer untuk pembangunan jalan dan industri tapi tidak diikuti dengan pembangunan-pembangunan penghijauan otomatis kota ini menjadi kota yang kotor dan kumuh. Dengan adanya pembangunan RTH ini diharapkan kedepan kota Semarang akan menjadi lebih baik. fungsinya yaitu menjadi sebuah kota yang dinamis dan menjadi sebuah kota yang bersih dari polusi, dan ini merupakan salah satu cita-cita sebuah kota metropolitan bukan hanya terjadi di kota Semarang saja. Ini bukan semacam ikut-ikutan tetapi merupakan sebuah kebutuhan kota metropolitan.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Sasaran maupun visi misi yang hendak dicapai yaitu ingin meningkatkan mutu kualitas lingkungan di Kota Semarang yang nantinya menjadikan Kota Semarang menjadi sebuah kota hijau yang berdaya saing.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya adanya Ruang Terbuka Hijau yang memadai, menjadikan kota Semarang bersih dan bebas dari polusi, dan menjadikan kota Semarang menjadi sebuah Kota Hijau yang berdaya saing.

## **2. Merumuskan/ membuat kebijakan**

Adanya visi, misi dan tujuan yang jelas untuk saat ini belum cukup mengingat masih rendahnya kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Untuk mencapai sasaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam tahapan-tahapan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Ya tentunya dari pemerintah kota selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan, bila memungkinkan ada potensi apa di lingkungan kecamatan ataupun kelurahan bisa di komunikasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Sering melakukan koordinasi nanti kawasan-kawasan yang keliatannya kurang menarik bisa kita bangun”. (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Kita saat ini jujur kekurangan SDM tenaga pakar *lanscape* dari komponen SDM bidang Pertamanan dan Pemakaman. Oleh karena itu kedepan kita akan mencari dan menambah tenaga-tenaga *lanscape* untuk perencanaan pembangunan taman yang ada di kota Semarang, karena kita tahu dengan adanya pakar ahli *lanscape* otomatis di kota Semarang pembangunan taman akan lebih dominan lagi. Tanpa adanya suatu tenaga ahli *lanscape* pembangunan taman ini kurang memadai walaupun kita sudah mengundang beberapa pakar tapi masih menggunakan tenaga pihak ketiga. Harapan program kita kedepan memiliki tenaga ahli sendiri di bidang Pertamanan dan Pemakaman, jadi kita tidak perlu lagi mengundang tenaga-tenaga ahli dengan biaya yang besar tapi justru tenaga-tenaga di bidang Pertamanan dan Pemakaman akan kita manfaatkan untuk bisa membangun kawasan-kawasan tertentu.”  
(wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk semua kebijakan yang telah kita lakukan sudah melalui pembahasan di tingkat SKPD mas. Untuk bulan April, Mei akan dilaksanakan pelaksanaan pembangunan 25 taman baru meliputi 16 kecamatan. Pelaksanaan pembangunan itu harus melalui program DED dulu, setelah dilakukan pembuatan DED sesuai aturan yang ada dan sudah diketahui oleh bapak walikota selanjutnya akan dilakukan pelaksanaannya untuk dilelangkan melalui kantor ULP. Nanti pemenangnya bisa langsung melakukan 25 taman baru kota Semarang.” (wawancara 24 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan, menambah



tenaga-tenaga *lanscape* untuk perencanaan pembangunan taman, dan melakukan pembangunan 25 taman baru meliputi 16 kecamatan.

### **3. Menyusun target atau skala prioritas**

Skala prioritas merupakan urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Skala prioritasnya jelas itu dikawasan pinggiran, kalau kota sudah ada tinggal nanti kita melakukan perawatan dan melakukan penambahan-penambahan ruang-ruang lahan hijau yang masih efektif masih bisa kita optimalkan, tapi yang pasti di daerah-daerah itu kan kebanyakan masih hutan dan sudah tidak sanggup dikerjakan menjadi lahan apa, supaya kedepannya nanti disitu kan menjadi rame kalau sudah dilakukan pembangunan.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Susunan target sesuai dengan perencanaan, artinya perencanaan itu muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jadi kita mengikuti atas saran dan usul dari masyarakat dulu. Kita tidak punya program bahwa saya harus membangun taman tugu muda atau taman pahlawan, dari usulan masyarakat itu kita utamakan, selanjutnya apabila tidak ada usulan dari masyarakat baru kita skala prioritasnya melakukan pembangunan-pembangunan di perkotaan. (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Taman Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga berpendapat :

“Untuk skala prioritasnya kita melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dulu mas, jadi tidak sederhana itu kita membangun sebuah kawasan tanpa adanya keinginan dari masyarakat.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menyusun target perencanaan berfokus pada pembangunan di kawasan pinggiran dan target perencanaan muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau mengutamakan usulan dari masyarakat sendiri.

### **3.3 PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan, yang meliputi :

#### **1. Membagi pekerjaan dalam tugas operasional**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas di atas, beberapa informan mengemukakan pendapatnya tentang pembagian kerja dalam tugas operasionalnya. Pembagian kerja haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang maksimal. Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota ini terdiri dari 4 bidang kebetulan di tempat kami itu bidang pertamanan dan pemakaman. Kita mempunyai tugas banyak mas tidak hanya taman, kita ada tim taman, kita ada tim pohon, terus ada teman-teman sendiri yang dari UPTD taman yang memangku dan merawat taman. Jadi untuk pembagian kerja sebetulnya sudah memadai dan memenuhi (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga mengatakan :

“Di bidang Pertamanan dan Pemakaman itu ada tiga kepala seksi mas, beliau-beliau ini sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kami tidak akan melanggar tugas masing-masing dan semuanya saling mengawasi, kalau tidak sesuai dengan koridor justru akan menjadi *boomerang* bagi kita sendiri mas. Seperti kita tahu bahwa banyak pejabat yang menyalahgunakan tugas dan kewajibannya.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk pembagian kerja dengan tugas yang sangat banyak perlu di dukung dengan staf yang memadai. Di kantor mungkin cukup tapi untuk di lapangan saya kira masih butuh banyak tenaga untuk pengawasan.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pembagian kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sendiri dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

## **2. Menempatkan orang pada pekerjaan atau posisi yang tepat**

Setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon-calon karyawan tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan karyawan yang sesuai pada posisi yang tepat bukan saja menjadi keinginan organisasi tetapi juga menjadi keinginan karyawan. Dengan demikian karyawan yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan merasa termotivasi dan bersemangat dalam bekerja dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Tataran kepegawaian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sendiri sudah banyak orang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi namun pada kenyataan di lapangan masih ada pegawai tersebut yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diembannya. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan hampir semua mengatakan bahwa penempatan pegawai masih kurang sesuai, namun menurut mereka hal tersebut tidak menjadi masalah karena dengan begitu akan memacu untuk belajar lebih baik lagi. Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk masalah penempatan posisi pegawai saat ini sudah sesuai bidang masing-masing mas, boleh dibilang 75% sudah sesuai.”

(wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“kalau dikatakan sesuai atau tidak saya sebetulnya mengatakan karena saya orang dinas ya sesuai kecuali saya orang luar, karena orang luar melihatnya kan lain daripada kacamata sendiri. Kalau dari kacamata dinas harus sesuai karena saya itu ditunjuk berarti harus sesuai kemampuan, kalau tidak kenapa saya dipilih disini. Jadi semua itu sudah ditunjuk oleh pak walikota melalui sekretaris daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini disebabkan spesifikasi yang tidak jelas dari penempatan pegawai. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bila pegawai tersebut mau belajar dan meneuni pekerjaan yang dilakukan.” (wawancara 24 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kaitannya dengan penempatan orang pada posisi yang tepat masih kurang sesuai disebabkan spesifikasi penempatan yang tidak jelas dari penempatan pegawai, sehingga membuat kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menjadi kurang optimal.

### **3. Menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional**

Dengan adanya prospek yang besar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Penataan Ruang maka guna mengoptimalkan hal tersebut dibentuklah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Pembentukan struktur yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan saat ini.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Struktur apa? Dinas apa bidang? Bidang aja. Kalau Dinas saya kira itu yang mengatur dari kepegawaian, khusus yang di bidang pertamanan hampir 75% sudah menjalankan itu dan sesuai dengan pendidikannya.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Ya strukturnya pasti sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, kita tidak berani mengambil resiko yang sudah ditetapkan oleh walikota. Misalnya saya bidang pertamanan dan pemakaman tapi saya tidak melaksanakan sesuai dengan tupoksi saya, nanti saya diambil tindakan oleh pak walikota bahwa saya dianggap tidak royal terhadap walikota.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga mengatakan :

“Kalau struktur saya rasa sudah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing mas, karena ini kan mengacu pada SOTK.”

(wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kaitannya dengan penetapan struktur yang sesuai sudah baik, hal ini karena secara struktur sudah ada susunan yang jelas, yaitu dengan dibentuknya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja ) sehingga membuat tugas yang dikerjakan menjadi terkoordinasi dengan baik.

#### **4. Koordinasi semua pekerjaan bawahan**

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dan dimaksudkan agar para atasan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Koordinasi yang dilakukan harus berjalan optimal dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan kepada bawahan.

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Kalau masalah koordinasi memang teman-teman sudah sesuai dengan aturan main dalam arti yang memberi perintah memang dari kita, sifatnya permohonan memang dari kita tapi kalau rutinitas itu sesuai dengan tupoksi mereka.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk masalah koordinasi pastinya sudah baik karena ada semacam penilaian, namanya penilaian SKP. Itu kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan *job description* dari masing-masing bawahan dia tidak akan mendapat nilai yang memadai. Itu dilakukan tidak hanya setahun sekali tetapi sekarang ini dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada laporan. Terkait dengan kinerja mereka masing-masing apakah itu tenaga PNS, CPNS, maupun *Outsourcing* kalau dia itu tidak melaksanakan sesuai *job description* akan dikenakan sanksi, apalagi *outsourcing* maka tahun berikutnya tidak akan kita gunakan.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memberikan pendapatnya :

“Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan baik, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Kalau tidak, mungkin pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan baik.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kaitannya dengan koordinasi semua pekerjaan bawahan sudah baik karena adanya semacam penilaian SKP.

### **3.4 PENGGERAKAN**

Penggerakan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif supaya pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang meliputi :

#### **1. Mengupayakan adanya partisipasi dari semua pihak yang terlibat**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di bidang Pertamanan dan Pemakaman senantiasa selalu mengupayakan adanya partisipasi



dari semua *stakeholder* agar tercipta kondisi yang harmonis yang pada akhirnya akan menunjang perkembangan RTH di Kota Semarang. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Cara untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang pertama memang taman-taman yang sudah ada yang kita kelola tanggung jawab kita, cuman ada taman yang menjadi kewajiban masyarakat sendiri dimana masyarakat itu bikin taman sendiri dan dikelola masyarakat sendiri. Jadi masyarakat punya lahannya pemkot tapi dikelola sendiri sama mereka mas.” (wawancara 24 Februari 2017)

Di samping itu Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan bahwa :

“Ya kita selalu memberikan sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat secara langsung melalui kelurahan/kecamatan maupun lewat media-media apakah itu TV ku, TV lokal terutama kalau TV Nasional kita belum bisa lakukan karena itu membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, tapi kalo TV lokal justru mereka yang meminta kita untuk dilakukan sosialisasi yang diikuti oleh pakar lanscape.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Untuk mengupayakan partisipasi masyarakat kita memberikan kesempatan kepada pihak masyarakat untuk mengelola sebagian taman-taman mas, karena taman-taman di Kota Semarang ini bukan hanya kita saja yang mengelola tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi mengelola sendiri.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

mengupayakan partisipasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi pembinaan melalui kelurahan/ kecamatan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sebagian taman-taman.

## **2. Memberikan motivasi**

Motivasi merupakan salah satu faktor utama di dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama motivasi di antara pegawai dan motivasi yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan. Motivasi yang diberikan berupa motivasi yang sifatnya membangun untuk meningkatkan gairah kerja bawahan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Seksi Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang,

“Kalau motivasi ya kita sering mendatangi aja, saya sering mendatangi teman-teman yang bekerja di staf sini. Kalau sering mengontrol kan nantinya jadi termotivasi, gak dibiarkan begitu aja tetap kita ada *controlling* mas.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Kita setiap saat, setiap waktu ada arahan-arahan pembinaan yang dimana pimpinan memberikan arahan kepada kita agar pekerjaan itu sesuai dengan koridor yang ada. Kalau tidak nantinya pekerjaan itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, jadi diawali dari bawahan diberikan arahan-arahan pekerjaan sesuai dengan job description. Seperti misalnya saya mempunyai bawahan saat ini 18 orang, makanya selalu kita memberikan arahan-arahan mengikuti petunjuk pimpinan sesuai dengan job description yang diberikan. Kalau dia tidak mengerjakan itu ya nantinya akan dikenakan sanksi.” (wawancara 27 Februari 2017)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Ya kita selalu memberikan motivasi kepada bawahan dengan arahan pembinaan untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja mereka, kalau kita tidak memberikan motivasi nantinya kinerja mereka buruk dan tidak sesuai dengan harapan.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melakukan kontrol terhadap bawahan dan pemberian arahan- arahan pembinaan sesuai dengan *job description* yang diberikan pada saat acara rapat.

### **3. Mengembangkan potensi bawahan secara optimal**

Salah satu hal yang membuat staf dalam suatu organisasi bekerja maksimal yaitu adanya pengembangan potensi diri yang baik. Untuk pengembangan pegawai, biasanya pegawai mengikuti atau diundang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan langsung yang ditetapkan oleh pimpinan terhadap bawahan.

Namun, hal tersebut dirasakan masih kurang mengingat kompleksnya permasalahan di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Ada beberapa memang teman-teman yang berpotensi punya inovasi demi kemajuan kota Semarang pengembangan taman dan hutan-hutan kota. Banyak teman-teman yang memang ahli disitu,

inovasi yang mereka tuangkan kita tampung mas.” (wawancara 24 Februari 2017)

Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Penegendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bapak Didik Budiono mengatakan :

“Pengembangan potensi pastinya ada karena setiap institusi pemerintah itu ada namanya kesempatan belajar, kalau dia punya kinerja nya bagus akan diberikan kesempatan pendidikan sesuai bidangnya. Umpama dia S1 ada pendidikan S2, bila perlu ada pendidikan S3 kalo memang dia benar-benar mampu pasti diberikan kesempatan oleh pemerintah. Namun, kalo disini masih jarang mas itupun kalo ada paling hanya beberapa orang. Seperti saya dulu diberi kesempatan pemerintah untuk melanjut S2.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menuturkan :

“Potensi pegawai di sini bisa dikatakan baik mas, kalau pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk pengembangan potensi masih jarang mas.” (wawancara 27 Februari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam pengembangan potensi dari bawahannya ialah sebagai berikut :

- a. Menampung inovasi yang diberikan oleh setiap bawahan
- b. Pembinaan secara internal oleh pimpinan
- c. Pemberian kesempatan pendidikan

### **3.5 PENGAWASAN**

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahap sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan penggerakan (*actuating*). Langkah selanjutnya yaitu perlu dilakukan pengawasan atau *controlling* terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau malah sebaliknya.

#### **1. Menetapkan standar atau ukuran**

Kaitannya dengan pengawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban, kemandirian dan keawajaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Pengawasan yang dilakukan rutin mas, selalu ada teman-teman untuk kelilingan melakukan pengawasan dan biasanya satu minggu kita selalu mengadakan rapat pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui ada keluhan-keluhan apa, ada inovasi-inovasi apa. Untuk pengembangan itu kedepannya biasanya kita tampung jadi satu, termasuk untuk keluhan-keluhan alat kerja yang kurang maksimal.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Di bidang kami ada namanya Buser tim pengawas di lapangan, jadi setiap taman yang ada di Kota Semarang yang sudah kita

programkan apakah itu taman yang lama dalam rangka perawatan ataupun pembuatan taman baru. Itu ada pengawasnya dari tim Buser ini dan jumlahnya cukup banyak sekitar 36 atau 37 tim untuk melakukan penempelan, pemotongan kalau tidak sesuai atau pohon itu dinyatakan sudah mau rapuh. Ada beberapa taman yang biasanya oleh perguruan tinggi, atau LSM maupun masyarakat tertentu melakukan orasi demo-demo itu keliatan tidak melihat bahwa taman itu dirawat dengan baik oleh pemerintah tapi mereka menginjak taman tersebut. Jadi itu tugas dan kewajiban bidang taman yang akan melakukan perbaikan taman tersebut, karena kalau tidak langsung dilakukan perbaikan kembali nanti wajah Kota Semarang semakin terpuruk." (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Kalau standarnya kita disini berbasis kepada SOP yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota mas, nanti kalo kita tidak mematuhi standar tersebut itu sama aja kita tidak menghargai kita sendiri sebagai pejabat pemerintah/ pelayan masyarakat.” (wawancara 27 Februari 2017)

## **2. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan**

Bentuk perubahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu dengan melakukan pembangunan di kawasan pinggiran dan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan, melakukan pembangunan taman baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan melakukan pengembangan di bidang SDM. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Bentuk perubahannya salah satu contoh gini, di daerah katakanlah agak-agak ke pinggir biasanya tidak begitu kita urus karena katakanlah kita kalo menangani satu kota Semarang begitu kewalahan dan masih membutuhkan banyak tenaga. Nah ini satu minggu sekali kita cek bersama-sama yang dipinggir sana kan

kumuh lalu mulai kita benahi dan kalau kurang maksimal kita lakukan pembenahan lagi. “ (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Ya banyak perubahan yang kita lakukan mas, terutama untuk pembangunan-pembangunan taman baru sesuai dengan keinginan masyarakat maupun para pakar itu pasti akan kita aktualisasikan dan kita penuhi, namun dengan berbagai macam pertimbangan kalo memang anggaran itu ada kenapa tidak. “ (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang mengatakan :

“Perubahan yang dilakukan banyak mas, seperti misalnya di bidang pengembangan SDM sendiri kita melakukan perubahan dengan menambah jumlah personel untuk pengelolaan taman.” (wawancara 27 Februari 2017)

### **3. Proses akuntabilitas**

Di dalam akuntabilitas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang setiap tahun akan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) baik untuk anggarannya maupun pelaksanaannya, selain itu bisa tercermin dari komitmen atasan dan staf dalam menaati hal tersebut. Di samping itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah memiliki Rencana Kerja (Renja) dan mengadakan pertemuan yang dilakukan setiap seminggu sekali. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Untuk akuntabilitas semuanya kita kerjakan sesuai target yang nanti setiap tahunnya kami selalu membuat Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP), dan kita juga seminggu sekali melakukan pertemuan buat melaporkan tugas masing-masing mas.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Ya kalo proses akuntabilitas pastinya berdasarkan rencana kerja dan sesuai dengan kebijakan bapak pimpinan mas, kita akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Untuk akuntabilitas, semua kita kerjakan sesuai dengan target yang nanti setiap tahun kami membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP).” (wawancara 27 Februari 2017)

#### **4. Mengevaluasi kinerja**

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, hal yang tidak kalah pentingnya dari suatu proses kebijakan ialah mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kondisi di lapangan, dengan cara tersebut maka dapat diketahui apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau belum.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai di lingkungan dinas, maka dapat diperoleh hasil bahwa tahap pelaksanaan



Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang sudah dilaksanakan hingga saat ini sudah cukup sebanding dengan rencana yang ditetapkan, karena adanya peningkatan dari kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dari tahun sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang :

“Sementara ini tingkat keberhasilannya Alhamdulillah bisa dikatakan berjalan baik, ya belum maksimal tapi berjalan baik dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kalau itu sudah merata kesitu ya peningkatannya baguslah.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Untuk tingkat keberhasilan belum mencapai 100% mas, karena tidak segampang kita membalik telapak tangan. Namun untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Belum 100% tingkat keberhasilannya, karena masih dijumpai adanya kendala. Kita akan tetap berusaha agar nantinya bisa mencapai 100% mas.” (wawancara 27 Februari 2017)

### **3.6 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang**

Di dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang masih menemukan hambatan-hambatan baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Hambatan faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sendiri. Masalah utama adalah faktor Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, karena masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada.

#### **b. Faktor Eksternal**

Hambatan faktor eksternal yaitu berasal dari luar lingkungan dinas. Masalah utama adalah faktor kebudayaan dari masyarakat di Kota Semarang. Hal ini menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang.

Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Hambatan yang kita hadapi saat ini di bidang SDM, kita kekurangan sumber daya manusia di bidang lanskap pembangunan taman atau tenaga ahli pakar di bidang pertamanan. Saat ini kita masih mengundang tenaga ahli pakar dari pihak ketiga mas. (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Banyak sekali hambatan karena tidak segampang itu, contoh banyak demo-demo dari masyarakat atau organisasi/ LSM yang tidak bertanggung jawab yang merusak taman. Adanya pencurian tanaman-tanaman yang bagus di perkotaan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga. Nuwun sewu, karena kembali budaya, dimana belum adanya kesadaran dari masyarakat sendiri dan taunya merusak saja. Orang Semarang tidak mesti orang Semarang semua kan, ada juga urban dari beberapa wilayah. Nah ini yang menjadi efek dalam pembangun dari suatu wilayah pasti ada dampak-dampak seperti itu. Yang pasti di setiap daerah itu akan bisa sukses, untuk bisa maju itu tergantung dari karakter budaya masyarakat setempat.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga menambahkan :

“Kalau kendala seperti yang saya sampaikan tadi mas, seperti misalnya di bidang pengembangan SDM kita melakukan penambahan jumlah personel untuk pengelolaan taman, nah itu karena kita memang kekurangan personel pengelola taman makanya kita lakukan penambahan.” (wawancara 27 Februari 2017)

### **3.7 Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam Pengelolaan**

#### **Ruang Terbuka Hijau**

Suatu permasalahan yang muncul pasti ada jalan keluar untuk memecahkannya, begitu juga dengan munculnya hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Jais Suyono selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan :

“Kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas SDM kita dan kedapannya kita akan mengusahakan mempunyai tenaga ahli

sendiri jadi tidak perlu lagi mengundang tenaga ahli dan mengeluarkan biaya yang banyak.” (wawancara 24 Februari 2017)

Bapak Didik Budiono selaku Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berpendapat :

“Kita secara bertahap menjaga kita ada yang namanya tim Buser tadi, dan kita selalu mengupayakan para tim ini bisa kerja secara maksimal dengan membuat semacam atau kita atur sesuai jadwal. Jadi jadwal pagi, sore, malam kita atur sesuai dengan koridor tugas job masing-masing. Jadi tim buser kita yang jumlahnya ada 39 tim itu menjaga lingkungan, menjaga kualitas selalu kita berikan semacam pembinaan-pembinaan secara rutin agar mereka itu aktif untuk peningkatan di wilayahnya.” (wawancara 27 Februari 2017)

Ibu Diana Lilawati selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menambahkan :

“Upaya yang kita lakukan ya dengan itu tadi menambah jumlah personel pengelola taman mas.” (wawancara 27 februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM dengan mempunyai tenaga ahli sendiri di bidang taman, membentuk tim pengawasan untuk menjaga kualitas lingkungan dengan memberikan pembinaan-pembinaan secara rutin, dan melakukan penambahan kuantitas Sumber daya manusia.